

Hak asasi atas akses air pada masyarakat di kota Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal-Provinsi Sumatera Utara = Rights of access to water on society in Natal District Town Mandailing Natal Regency-Province of North Sumatera

Andra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444905&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Hak asasi atas akses air menjadi hak mendasar untuk dapat hidup bagi setiap orang. Oleh karena itu, kebutuhan akan air sangat vital. Hal itu terkait air sebagai unsur penting bagi keberlangsungan hidup setiap orang di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu landasan pengaturan terkait kepastian di dalam pemenuhan hak asasi atas akses air. Pengaturan tentang air di Indonesia kembali pada Undang ? undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PU-XII/2013. Putusan tersebut membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LNRI 2004-32; TLNRI 4377). Pembatalan itu adalah terkait penafsiran berbeda atas pelaksanaan hak atas air. Dengan demikian terjadi perubahan fungsi sosial air yang lebih menekankan hak guna usaha atas air yang dijalankan oleh pihak swasta dibandingkan dengan hak guna pakai air bagi masyarakat. Di samping itu, adanya pergeseran peran pemerintah dalam menyediakan air bagi masyarakat. Namun ke semua hal itu dalam kenyataannya belum dapat mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat terkait akses mereka atas air, khususnya di Kota Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air tetap saja terbatas. Begitu pula pemberdayaan masyarakat terkait masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan dari berbagai perencanaan yang dibuat oleh pemerintah juga belum dapat mensejahterahkan masyarakat di Natal. Hal itu bahkan berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air di antara masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persoalan pemenuhan hak akses air bagi masyarakat di Natal seperti tidak meratanya distribusi air terakit saluran akses air dari sumber air yang ada beberapa rumah masyarakat. Sarana dan prasarana sumber daya air masih minim dalam memenuhi akses masyarakat atas air di Natal. Di samping itu pemberdayaan masyarakat masih lemah di mana sebagian masyarakat di Natal belum memiliki pemahaman apa yang menjadi haknya dalam akses terhadap air. Terkait landasan pengaturan, Kabupaten Mandailing Natal masih belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait sektor sumber daya air. Upaya ? upaya pemerintah daerah terkait kewajiban terhadap pelaksanaan atas perencanaan pembangunan akses air masih belum dijalankan dengan baik. Selain itu, dikaji

bagaimana landasan pengaturan atau hukum dan upaya ? upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak asasi atas akses air khususnya bagi masyarakat di kota kecamatan Natal.

<hr>

ABSTRACT

Rights of access of water into the fundamental right to be able to live for everyone. Therefore, the need for water is vital. This is related to water as an essential element for the survival of everyone in a community. Therefore, we need a foundation of certainty in the regulations related to the fulfillment of rights of access to water. The arrangement of the water in Indonesia returned to the Act No. 11/1974 on Irrigation imposed by the Constitutional Court Decision No. 85 / PUXII / 2013 that withdrawal the Act No. 7/2004 on Water Resources (LNRI 2004-32; TLNRI 4377). Withdrawal because of different interpretations related to the implementation right to water. Thus a change in the social function of water is more emphasis on the right to cultivate the water run by the private water right run by private than the right to use water for the community. In addition, the shift in the role of government in providing water for the community. But to all of it in fact it cannot to resolve the basic problems faced by the peoples related to their access to water, especially in the Town District of Natal, Mandailing Natal, North Sumatra Province. In other side, public infrastructures for support access to the water remains limited. Similarly, there no community development related to water resources management. Implementation of the various plans made by the government is not yet able to prosper the community at Natal District City. It even has the potential to create a conflict of interest in the utilization of water resources between local peoples and private. This study research is intended to determine how the issue of the fulfillment of rights to access for water in the peoples such as the Town District of Natal uneven distribution of water connection via assembled of water drains from water sources for peoples houses. Meanwhile, existing water sources in Natal are shared by the community. Supporting elements in the form of infrastructure of water resources is still minimal of access water for peoples in Natal. In other side, the empowerment of people still weak where most peoples in Natal did not have an understanding of what they are entitled for access to water. Mandailing Natal Regency still has no local regulations level related to water resources sector. Efforts made by local government authorities, and obligations related to the implementation of planning the construction of water access are still not well executed in the field. In addition, it was studied how the legal foundation, legal arrangements and efforts by Local Government of Mandailing Natal in fulfill for rights of access to water especially for people in the Town District of Natal.